

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anderson, E.J. 1992. *Publik Policy Making*, Holt Rinehartang Winston 2n dec, New York.
- Bratakusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Danusaputro, M. 1985. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Cetakan Kedua. Binacipta, Jakarta.
- Easton. D. 1984. *A Frame Work For Political Analysis*, Prentice Hal inc Englewood Cliff, New York.
- Estiningsih, M. 2004. *Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Hardjasoemantri, K. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Delapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, M.P, 1997, *Tentang Wewenang Dalam Yuridika Nomor 5 dan 6*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Huda, N, 2005. *Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Juanda, 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Alumni, Bandung.
- Kambu M.R, 2004. *Membangun Jayapura Menuju Kota Beriman, Maju, Mandiri, dan Sejahtera*. Setda Kota Jayapura.
- Kansil C.S.T, 1989, *Hukum Tata Pemerintahan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 1997, *Agenda 21 Indonesia Strategi Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Keraf, S, 2002. *Etika Lingkungan*, Buku Kompas, Jakarta.
- Laswel, H.D dan Kaplan, A, 1970. *Power and Society*, Yale University Press, New Haven.

- Mahfud, M. MD, 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta.
- Manan, B, 2004. *DPR dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. Cetakan II. FH UI Press, Jakarta.
- , 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kelima. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Marbun, B.N, 2005. *DPRD Otonomi Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marbun, S.F, 1989 *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbaikan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Nurcholis, H, 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Said M.M, 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Sanit A, 1985, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Silalahi, D, 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung.
- Soehino. 1997. *Hukum Tatanegara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah*. Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta.
- Soemarwoto, O. 2004. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Cetakan Kesepuluh, Djambatan, Jakarta.
- , 2003. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Subagyo, P.J. 2003. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.

Sundari, S.R. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya.

Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijoyo, S. 2005. *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah*. Airlangga University Press, Surabaya.

Yudoyono, B. S, 2000, *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pembangunan SDM Aparatur Pemmerintah Daerah dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Makalah:

Bernadus Sukismo, Metode Penelitian Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soedarto, 2001, Metode Penelitian Hukum, FH Universitas Cenderawasih, Jayapura.

Koran dan Majalah:

Andreas, Masalah Lingkungan Hidup Masih Dilihat Bukan Persoalan Inti, Media Indonesia, 12 Februari 2005.

M. Ridha Saleh, Lingkungan Hidup Belum Menjadi Agenda Politik, Media Indonesia, 18 Oktober 2004

Ryaas Rasyid, Berita Suara Otonomi, Depdagri, Terbitan 6-7 Tahun 2003

Informasi dari internet:

LSM, Permasalahan Lingkungan Di Jayapura <http://www.Westpapua.net/addComenph>, 12 Februari 2006.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

PP No. 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kota Jayapura Tahun 2002-2006.

Surat Keputusan DPRD Kota Jayapura Nomor 01/DPRD-KOTA/PRP/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Jayapura.